

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pada era globalisasi saat ini tingkat kemiskinan semakin meningkat. Dikutip dari Badan Pusat Statistik (2021:1), Provinsi Jambi memiliki Persentase Kemiskinan cenderung tidak stabil, dari tahun 2017 sampai 2019 pernah terjadi penurunan, namun mengalami perubahan kenaikan kembali ditahun 2020 sebanyak 7.58% menjadi 8.1% pada tahun 2021. Hal ini berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19. Untuk Kota Jambi persentase kemiskinan tahun 2021 yaitu sebanyak 9,02%, berada pada urutan ke-4 dari total wilayah 10 Kabupaten dan 2 Kota yang ada di Provinsi Jambi.

Dalam rangka meminimalisir masalah kemiskinan terutama berbasis rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk meningkatkan perekonomian, pemerintah memberikan bantuan sosial dari bermacam jenis program, salah satunya adalah bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) (Zakiah, Lestari, & Putra, 2020:4).

PKH terfokus pada dua komponen yaitu bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan kunci utama agar dapat melakukan aktivitas dengan baik, apabila kesehatan terjamin maka pendidikan seseorang akan baik dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika kedua komponen sudah terpenuhi maka sumber daya manusia meningkat, sehingga masyarakat mandiri serta mampu mengentaskan diri dari lingkaran kemiskinan (Supratman, 2019:4).

Program bantuan sosial PKH di salurkan kepada 11 Kecamatan di Kota Jambi, Kecamatan Danau Sipin adalah salah satu kecamatan yang mendapatkan

bantuan dana PKH. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2021 di Wilayah Danau Sipin Kota Jambi mencapai 1.688 KPM dari total 13.796 KPM (Data diambil langsung di PKH Dinsos Kota Jambi oleh peneliti).

Dalam penyaluran bantuan dana PKH Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Bab 2 Pasal 3 ayat 1&2 (2017:3&4), menyebutkan penyaluran bantuan sosial dengan sistem Non Tunai dilaksanakan oleh pemberi Bansos melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial itu sendiri, Bank Penyalur dimaksud adalah Himpunan Bank milik negara (Himbara). Penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada penerima dilakukan secara efisien sehingga dapat tepat sasaran, jumlah yang sesuai, tepat waktu, dan sesuai administrasi.

Dikutip dari Kementerian sosial (2018:7), Program pemerintah jenis PKH mulai menerapkan mekanisme penyaluran dana bantuan sosial Non Tunai pada tahun 2018. Perubahan sistem penyaluran dana dalam PKH dari sistem bantuan Tunai berubah menjadi sistem Non Tunai dilakukan agar penyaluran dana mudah dikontrol serta dipantau, dan meminimalisir terjadinya penyimpangan (Azizah, 2018:1).

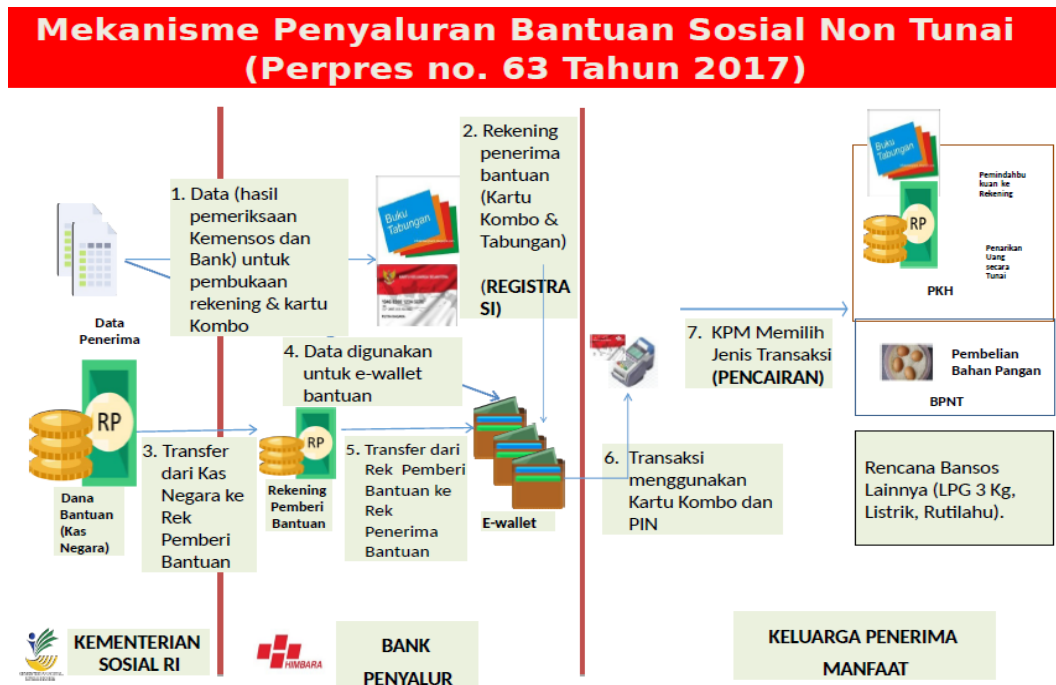
Penyaluran dana bisa dikatakan baik apabila sistem itu akuntabel maksudnya dapat dipertanggung jawabkan dan tepat sasaran ke penerima bantuan sosial. Sistem penyaluran yang tepat waktu, sasaran yang tepat, dan jumlah yang tepat dapat meningkatkan akuntabilitas program penyaluran bantuan sosial PKH sehingga tujuan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dapat tercapai (Azizah, 2018:4). Penyaluran bantuan sosial hanya dapat dilakukan dengan

dukungan sistem informasi dan sistem pengelolaan data yang baik dalam menjalankan proses pendataan, pemutakhiran, validasi, yang harus sesuai dengan kondisi nyata agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran (Retnaningsih, 2021:1).

Program PKH adalah bantuan tunai diterima oleh KPM tetapi sistem informasi akan berkembang selama masa hidup suatu program tersebut, dimana sistem informasi akuntansi ini merupakan sebagai sistem terbuka sehingga tidak terjamin sebagai sistem yang bebas dari kecurangan atau kesalahan (Saputra, 2021:1). Sistem informasi pada dasarnya merupakan suatu sistem yang dibuat manusia terdiri dari komponen dalam organisasi, memiliki tujuan menyajikan informasi. Dalam organisasi sistem informasi mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan (Moenek, Suwanda & Santoso, 2020:16). Sistem informasi akuntansi (SIA) yaitu seperangkat prosedur dengan tujuan membangun informasi yang berguna dan tepat untuk semua pihak (Winarno, 2016:21).

Berdasarkan uraian mengenai sistem informasi akuntansi maka diperlukan peran SIA yang efektif dan mudah dimengerti dalam pelaksanaan program PKH, salah satunya sebagai sistem informasi mekanisme pelaksanaan dan penyaluran dana PKH. SIA yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap kontrol dan transparansi penyaluran dana jika informasi yang disampaikan dapat mudah dimengerti. SIA terdapat teknik biasanya menggunakan *Flowchart* yaitu disebut juga Bagan Alur. *Flowchart* atau bagan alur terdiri dari beberapa prosedur dalam sebuah sistem, fungsinya menunjukkan tahapan operasi dan arus data dari satu bagan ke bagan lainnya (Dwi Sulistiani, 2019:3).

bagian alur SIA Penyaluran Dana Bantuan Sosial Sistem Non tunai berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, dijelaskan pada gambar 1.1 dibawah.



Sumber : Data dari pkh dinsos kota jambi diambil langsung oleh peneliti

Gambar 1.1 Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai

Maksud gambar 1.1 dikutip dari Kemensos petunjuk teknis penyaluran bansos non tunai pkh (2018:3), berdasarkan Peraturan presiden No.63 dalam penyaluran bansos PKH memiliki ketentuan pada mekanisme penyalurannya, mekanisme penyaluran bansos secara non tunai meliputi: proses pemeriksaan data oleh kementerian sosial dan bank untuk Pembukaan Rekening, melakukan Registrasi, Pemberian Rekening dan Kartu Kombo/KKS, Proses transfer dana bantuan dari Kas Negara ke Rekening Pemberi Bantuan, pemberi bantuan mentransfer dana bantuan ke rek penerima bantuan melalui E-walet yaitu aplikasi pembayaran online seperti Dana, LinkAja, Gopay dan lainnya, selanjutnya KPM

mengambil dana bantuan harus membawa kartu kombo/kks beserta pin kartu disini KPM memilih jenis transaksi pencairan jenis bantuan yang diterima.

Penyaluran dana PKH sistem Tunai berubah menjadi sistem Non tunai ternyata masih mendapatkan problematika di masyarakat penerima bantuan terutama bagi KPM di Kecamatan Danau Sipin.

Berdasarkan temuan aktual dilapangan oleh peneliti pada saat observasi awal di Kecamatan Danau Sipin, ada ketidaksesuaian antara KPM A dan KPM B bahwa jumlah dana bantuan yang diterima berbeda. Masalah lain, mereka sudah ada kartu KKS (kartu keluarga sejahtera) tetapi dana bantuan tidak bisa dicairkan saat penggesekan, keterangan saldo kartu 0. Ada anggota KPM penerima PKH sudah meninggal, tetapi nama kpm masih terdaftar.

Sehingga dengan adanya kondisi masalah seperti ini peneliti beranggapan ada kemungkinan SIA tersebut tidak dilakukan dengan efektif, dan melihat apakah implementasi SIA dalam program PKH Dinas Sosial Kota Jambi sudah benar, oleh karena itu perlu diteliti dan dilakukan analisis.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya oleh Zuhendra & Devi (2021:11), mengenai sistem akuntansi pencairan dan penyaluran dana PKH Kota Padang dimana sistem penyaluran dana yaitu non tunai melalui bank BNI sudah berjalan baik namun masih ada kendala terkait kesulitan penyaluran dana pada KPM yang pindah kota, meninggal, dan kartu hilang. Selanjutnya Azizah (2018:6), mengenai analisis sistem informasi penyaluran dana PKH di Kec.Pagelaran, Malang diperoleh bahwa pengelolaan operasional penyaluran dana sudah sesuai dengan yang diharapkan, namun ada data yang kurang update dan form validasi pembukaan rekening kurangnya nomor atau kode pembuatan form

tersebut, dalam analisis pelaporan pertanggung jawaban keluaran PPKH belum cukup detail dan belum mencantumkan informasi hasil atas hasil penyaluran dana.

Selanjutnya Akhira (2021:59), mengenai analisis sia penyaluran dana program keluarga harapan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas (studi pada PPKH di Kampung Pisang Kecamatan IV Koto Kab. Agam), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan Nagari Kampuang Pisang telah memenuhi akuntabilitas administratif versi Antonio Bar Cendon, namun akuntabilitas tersebut belum nampak pada indikator subjek urusan dalam penanganan pemutakhiran data karena kurang cepat dalam penanganan pemutakhiran data sehingga masih terdapat KPM yang seharusnya sudah tidak menerima bantuan tetapi pada realisasinya masih menerima bantuan. Selain itu, adanya ketidak tepatan sasaran penerima karena data yang diperoleh dari DTKS yang tidak bisa diubah karena pemberhentian kepesertaan yang menjadi kewenangan pemangku wilayah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah yaitu: Bagaimana implementasi sistem informasi akuntansi dalam penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem informasi akuntansi dalam penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

1.4 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi fokus penelitian pada masalah ini yaitu Sistem informasi akuntansi yang digunakan dan yang diterapkan sebagai mekanisme pelaksanaan dalam penyaluran dana PKH.

Dimana peneliti berfokus pada sebagai berikut.

1. melihat SIA yang digunakan dalam pelaksanaan program bantuan PKH pada penyaluran dana di Kecamatan Danau Sipin.
2. mengetahui implementasi SIA yang digunakan dalam penyaluran dana PKH di Kecamatan Danau Sipin.
3. mengetahui permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan SIA dalam penyaluran dana bansos PKH di Kecamatan Danau Sipin.
4. menemukan solusi dari hambatan yang ada dalam pelaksanaan SIA pada pelaksanaan dan penyaluran dana program PKH di Kecamatan Danau Sipin.

1.5 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, sumbangan pemikiran dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi pada penyaluran dana bantuan sosial PKH.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sistem informasi akuntansi penyaluran dana PKH di kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

a) Bagi PPKH

Bagi pelaksana program keluarga harapan (PPKH) hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan sistem informasi akuntansi pada mekanisme penyaluran dana bagi pihak PPKH di Kecamatan Danau Sipin mengenai sistem informasi akuntansi penyaluran dana program keluarga harapan (PKH).

b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam peningkatan mekanisme penyaluran dana pada sistem informasi akuntansi dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam program PKH untuk pengentasan masalah kemiskinan.

c) Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan literatur terutama untuk bidang pendidikan, serta dapat sebagai bahan rujukan.

d) Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan, memperdalam pengetahuan secara teoritis maupun pengalaman bagi peneliti mengenai sistem informasi akuntansi penyaluran dana PKH dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi.